



Kemerdekaan Harus Dipertahankan

SEJARAH INDONESIA PAKET C
SETARA SMA/MA
KELAS XI

MODUL TEMA 10

Email Guru :

bapajo2007@gmail.com

BAPA JO CHANNEL YOUTUBE

PEMBENTUKAN ARMADA PEMERINTAHAN RI

Untuk menjalankan roda pemerintahan maka dibentuklah kelembagaan negara agar pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuk antara lain sebagai berikut;

A. Sidang-Sidang PPKI

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai badan politik satu-satunya segera mengambil prakarsa dan tindakan politik untuk mengendalikan negara dengan menyelenggarakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu, PPKI berhasil menetapkan 3 keputusan penting, yaitu :

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI.
Ketika masih berupa RUUD, dilakukan beberapa perubahan atas usul Drs. Moh. Hatta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain : rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya mengambil dari isi Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Bab III, Pasal 6, UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli".
2. Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden (atas usulan Otto Iskandardinata)
3. Membentuk suatu Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR/DPR terbentuk.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang kedua. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Achmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo untuk membentuk Panitia Kecil yang akan membicarakan bentuk departemen, bukan personalianya. Rapat Panitia Kecil tersebut dipimpin oleh Otto Iskandardinata.

Dalam sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya yaitu :

- 1) Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden
- 2) Membagi wilayah RI ke dalam 8 propinsi serta menunjuk para gubernurnya
- 3) Akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Selanjutnya pada sidangnya yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, berhasil ditetapkan keputusan, yaitu :

- 1) Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta.
- 2) KNIP adalah badan yang berfungsi sebagai Pusat DPR sebelum Pemilu diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
- 3) PNI dirancang menjadi partai tunggal di Indonesia, (namun akhirnya dibatalkan)
- 4) Membentuk Badan Keamanan Rakyat. BKR ini berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

INTERACTIVE WORKSHEETS BY BAPAJO

B. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa alat-alat kelengkapan negara RI terdiri atas lembaga tinggi (Presiden, MA, DPR, DPA, BPK) dan lembaga tertinggi negara (MPR). Sementara MPR yang harus dibentuk melalui pemilu belum terbentuk, maka PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan akan membentuk Komite Nasional dengan tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP pertama dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam sidangnya, dikeluarkan dua keputusan yaitu :

- 1) Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dengan jumlah anggota 15 orang,
- 2) Mengusulkan kepada presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama DPR/MPR belum terbentuk. Usulan ini kemudian diperkuat dengan Maklumat Wakil Presiden No. X.

Dalam perkembangan berikutnya, BP-KNIP dikuasai oleh golongan sosialis pimpinan Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin. Golongan ini mendesak pemerintah untuk segera mengijinkan dibentuknya partai-partai politik. Sebab bila hanya satu partai politik saja dikhawatirkan muncul anggapan dari negara-negara Barat (Sekutu) bahwa Indonesia negara fasis, bukan negara demokrasi. Usul tersebut kemudian ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik

C. Pembentukan Kabinet RI dan Pembagian Wilayah

Sebagai realisasi hasil keputusan PPKI (19 Agustus 1945) tentang pembentukan 12 kementerian dan pembentukan wilayah RI ke dalam delapan provinsi, maka pada tanggal 2 September 1945, dibentuklah Kabinet RI pertama dan 8 provinsi. Kabinet RI pertama ini merupakan Kabinet Presiden I berdasarkan UUD 1945. Susunan Kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 departemen dan 4 menteri negara. Adapun 8 provinsi beserta Gubernurnya yaitu :

Tabel delapan provinsi beserta gubernurnya

No	Propinsi	Gubernur
1	Sumatera	Mr. Teungku Mohammad Hassan
2	Jawa Barat	Soetardjo Kartohadikusumo
3	Jawa Tengah	Rd. Panji Suroso
4	Jawa Timur	R.A. Soeryo
5	Sunda Kecil	I Gus Ketut Pudja J.
6	Maluku	Latoeharhary G.S.J.
7	Sulawesi	Ratulangi
8	Kalimantan	Ir. Pangeran Mohammad Noer

D. Pembentukan Badan-badan Perjuangan dan TNI

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pemerintah menegaskan bahwa BKR selain berfungsi sebagai badan penolong keluarga korban perang juga sebagai induk organisasi untuk memelihara keselamatan rakyat. Anggota BKR terdiri dari bekas anggota Peta, Heiho, Keibodan, Seinendan dan KNIL.

Untuk mengkoordinir BKR di daerah, maka bekas anggota Peta di Jakarta membentuk BKR

BAPA JO CHANNEL YOUTUBE

INTERACTIVE WORKSHEETS BY BAPAJO

Pusat dengan susunan pengurusnya :

Ketua Umum : Kaprawi (eks daidanco Sukabumi)
Ketua I : Sutaaksana
Ketua II : Latif Hendraningrat

BKR Pusat segera menjalin hubungan dengan BKR-BKR daerah seper BKR Jawa Barat (Arudji Kartawinata), Jawa Tengah (Soedirman), dan Jawa Timur (drg. Mustopo). Pembentukan BKR ternyata menimbulkan ke dakpuasan sebagian para pemuda yang menginginkan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi keinginan para pemuda tersebut ditolak oleh pemerintah dengan alasan agar dak memancing dan membangkitkan permusuhan terhadap kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia. Karena ditolak, akhirnya para pemuda seper Soekarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, dll. mendirikan badan perjuangan sendiri yang disebut Komite van Aksi yang bermarkas di Asrama Menteng 31 Jakarta. Adapun laskar- laskar pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi di antaranya : Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Barisan Banteng, Hizbullah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia. Selain itu ada kesatuan-kesatuan khusus yang dekat hubungannya dengan BKR, seper Tentara Pelajar, dan Tentara Genie Pelajar.

Gerakan pemuda yang tergabung dalam Komite van Aksi pada akhirnya menjadi bahan permbangan pemerintah dalam rangka pembentukan TNI yang juga didorong oleh situasi dan kondisi yang berat pada waktu itu, karena kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA. Pada bulan September sampai Desember 1945, merupakan masa-masa pertempuran sengit yang terjadi di kota-kota besar Indonesia dalam menghadapi NICA yang dibantu pasukan Inggris yang berencana menguasai kembali Indonesia. Menghadapi situasi yang kritis, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Kepala Staf Umumnya Letkol Oerip Soemohardjo. Oerip Soemohardjo terkenal dengan ucapannya, yaitu "Aneh suatu negara zonder tentara" (zonder = tanpa).

Sampai sekarang tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai Hari TNI atau Hari Angkatan Bersenjata. Pada tanggal 12 November 1945, pemerintah mengangkat Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TKR. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, dan tanggal 3 Juni diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Sekelompok Tentara Keamanan Rakyat dan Panglima Besar TKR, Jendral Soedirman.

E. Pembentukan Partai Politik

Sejalan dengan perkembangan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan, maka system kepartaian pun mengalami perubahan. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI hanya mengakui satu partai politik yang berlaku di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, tokoh-tokoh bangsa Indonesia merasa tidak puas dan menganggap sudah saatnya membentuk beberapa partai politik. Akibat desakan itulah, berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan partai-partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat Indonesia. Maklumat tersebut mendapat sambutan dari tokoh-tokoh partai politik.

Adapun nama-nama partai politik yang dibentuk diantaranya Partai nasional Indonesia (PNI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) Majelis Syura Moeslimin Indonesia (Masyumi), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Perkembangan partai politik menyebabkan timbulnya

INTERACTIVE WORKSHEETS BY BAPAJO

keberagaman ideologi yang berpengaruh terhadap kehidupan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberagaman ideologi politik tersebut disebabkan setiap partai politik menggunakan asas dan ideologi politik yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, jumlah partai politik di Indonesia terus bertambah. Mereka selalu bersaing untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat. Bahkan, diantara partai politik itu ada yang dijadikan alat oleh kaum politisi untuk berebut kursi dan jabatan dalam pemerintahan. Terjadilah pertentangan di antara partai-partai politik sehingga mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam suasana yang penuh pertentangan politik, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP (parlemen) bukan kepada presiden.

Pemerintah ternyata menyetujui usul tersebut sehingga terbentuklah Kabinet Parlementer pada 14 November 1945. Soetan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri sehingga kabinetnya dinamakan Kabinet Syahrir.

F. Perubahan dan Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan

Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan bertujuan agar dapat mengakomodasi suara-suara rakyat yang nantinya berguna bagi pemerintahan. tentunya partai-partai tersebut memiliki pergerakan yang berbeda satu sama lainnya. Salah satunya yaitu PNI yang merupakan gabungan dari Serikat Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Indonesia serta Gabungan Republik Indonesia pada tahun 1946.

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dari politik serta pemerintahan di Indonesia, antara lain adalah:

1. Faktor Internal, berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia;
Persaingan diantara partai politik yang satu dengan lainnya, terutama dalam hal perbedaan ideologi. Sehingga menjadi pengaruh yang cukup besar di dalam pemerintahan Indonesia.
2. Faktor Eksternal, berikut yang mempengaruhi perkembangan awal politik awal kemerdekaan Indonesia;

Datangnya bangsa Inggris yang berbarengan dengan NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Belanda. Sehingga menimbulkan beberapa peperangan di beberapa daerah. Status Jepang yang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia hingga beberapa sekutu datang ke Indonesia. Nah, berikut ini perjalanan perkembangan politik di Indonesia dari awal kemerdekaan yang berlangsung sampai tahun 1950:

1. Perubahan Sistem Presidensial Ke Parlementer (3 November 1945)
Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dimulai saat Maklumat Politik yang dikeluarkan Moh.Hatta pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan antara lain adalah:
 - KNIP difungsikan sebagai dewan perwakilan rakyat yang dilakukan sebelum melaksanakan pemilihan umum.
 - PNI (Partai Nasional Indonesia) dibentuk sebagai partai tunggal Negara Indonesia, namun akhirnya keputusan ini dibatalkan.
 - BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang difungsikan sebagai badan keamanan yang beroperasi di tiap tiap daerah.
2. KNIP dengan Lembaga Pemerintahan (14 Oktober 1945)

INTERACTIVE WORKSHEETS BY BAPAJO

Saat sidang pertama KNIP yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 oktober 1945, Sjahrir diamanati sebagai Ketua Badan Pekerja KNIIP. Saat persidangan berlangsung, banyak sekali anggota-anggota di dalamnya yang mengusulkan mengenai perubahan dari fungsi KNIP serta kerja KNIP yang tadinya hanya untuk membantu presiden menjadi sebuah Lembaga legislatif.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara (5 Oktober 1945 – 7 Juni 1947)
Perkembangan awal politik pada awal kemerdekaan dilanjutkan dengan pembentukan beragam alat kelengkapan keamanan negara yang ditugaskan untuk mengamankan Bangsa Indonesia. Alat Kelengkapan Keamanan Negara tersebut antara lain adalah:
 - TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945
 - TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibentuk pada 1 januari 1946
 - TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dibentuk pada 26 januari 1946
 - TNI (Tentara Nasional Indonesia) dibentuk pada 7 juni 1947
4. Perpindahan Ibukota Negara (Awal di Tahun 1946)
Sampai pada awal di tahun 1946, kondisi dari ibu kota Negara yaitu Jakarta mengalami kekacauan yang tak kunjung membaik. Banyaknya teror-teror dari bangsa asing yang ingin menguasai pemerintah Indonesia. Sehingga pada 14 Januari 1946, Pemerintah memindahkan ibu kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta.
5. Politik Luar Negeri (Awal Tahun 1950)
Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 45 disahkan pemerintah. Pada alinea 4 pembukaan UUD tercetus jika “melaksanakan ketertiban dunia berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial”. Karena itu lah terbentuk politik BEBAS AKTIF yang menyatakan bahwa Indonesia bebas dalam melakukan tindakan dan tidak dipengaruhi oleh negara lainnya serta keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengetik huruf a, b, c, d, atau e untuk jawaban yang tepat dan benar pada kolom yang telah disediakan !

1. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal berikut ini, salah satunya adalah ...
 - a. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
 - b. Pemilihan anggota MPRS dan DPRS
 - c. Mengesahkan UUD 1945
 - d. Pembentukan departemen dan kementerian RI
 - e. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia
2. Kedudukan KNIP sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tampak dari ...
 - a. Pembentukan KNIP merupakan hasil keputusan PPKI
 - b. Sebelum ada MPR, KNIP berwenang menetapkan GBHN
 - c. KNIP dirintis oleh panitia kecil yang dibentuk PPKI
 - d. Pembentukan KNIP berdasarkan keputusan presiden
 - e. KNIP memiliki kekuasaan tak terbatas
3. Pembahasan UUD 1945 dalam sidang PPKI tentang bentuk negara Indonesia telah disepakati bahwa negara Indonesia adalah negara ...
 - a. Republik Serikat
 - b. Yang bentuk negaranya mengikuti bentuk negara Belanda
 - c. Kesatuan yang berbentuk Republik
 - d. Yang mengikuti bentuk negara kekaisaran Jepang
 - e. Kesatuan yang berbentuk Parlementer
4. Tujuan didirikannya Putera oleh Jepang adalah ...
 - a. Menyelidiki tokoh-tokoh yang menentang Jepang
 - b. Mendidik para pemuda untuk menjadi tentara yang siap membantu Jepang
 - c. Mempersiapkan para pemuda untuk menjadi tenaga yang ahli dalam bidang administrasi
 - d. Membujuk semua kekuatan rakyat agar bersatu untuk membantu Jepang
 - e. Menangkap tokoh-tokoh perjuangan Indonesia
5. Hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945, yaitu bahwa proklamasi merupakan pengejawantahan isi jiwa bangsa Indonesia, yang artinya proklamasi ...
 - a. Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan
 - b. Sebagai jembatan emas yang merupakan penghubung untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke masa kemerdekaan
 - c. Menandai berdirinya negara Indonesia dan sekaligus dimulainya sejarah ketatanegaraan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
 - d. Merupakan perwujudan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dengan kehidupan yang bebas menentukan nasibnya sendiri
 - e. Merupakan perwujudan bebas dari Jepang

INTERACTIVE WORKSHEETS BY BAPAJO

6. Suasana sidang PPKI pada saat penyusunan konstitusi pertama didasari dengan semangat ...
 - a. Kebersamaan dan kekeluargaan
 - b. Eksklusivisme
 - c. Individualisme
 - d. Fanatisme
 - e. Heroisme
7. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diantara keduanya tidak dapat dipisahkan Proklamasi kemerdekaan merupakan *proclamation of independence*, sedangkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan
 - a. Declaration of independence
 - b. Declaration of human right
 - c. Rights of legal equality
 - d. Universal declaration
 - e. Universal of human right
8. Di bawah ini merupakan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, kecuali negara ...
 - a. Persatuan
 - b. Berkeadilan sosial
 - c. Berkerakyatan
 - d. Berkedaulatan Rakyat
 - e. Berperikemanusiaan
9. Sejak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia dibagi menjadi ... provinsi
 - a. 8
 - b. 12
 - c. 15
 - d. 21
 - e. 23
10. Deklarasi kemerdekaan yang terkandung dalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945, merupakan pernyataan yang bersifat ...
 - a. Lokal
 - b. Universal
 - c. Insidental
 - d. Sementara
 - e. Nasional